

TANGGUNGJAWAB MANTAN SUAMI TERHADAP UTANG ISTERI

(Studi Kasus Putusan Nomor 608/Pdt. G/2014/PA. Sgm)



Skripsi

Oleh:

MUH.WAHID

NIM: 10100111033

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Wahid
NIM : 101-001-110-33
Tempat/Tgl. Lahir : Cambaya, 10 Februari 1994
Jur/Prodi/Program : Peradilan Agama/Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan/S1
Alamat : Cambaya Desa Julu Kanaya Kecamatan Pallangga-Gowa
Judul : Tangguangjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri
(Studi Kasus Putusan Nomor 608/Pdt. G/2014/PA. Sgm).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata, 11 November 2015

Penulis,



MUH. WAHID

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara MUH.WAHID, NIM: 10100111033, Mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul: **“TANGGUNGJAWAB MANTAN SUAMI TERHADAP UTANG ISTERI (Studi Kasus Putusan Nomor 608/Pdt. G/2014/PA. Sgm)”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyas.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Samata, 11 November 2015.

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. MS.
NIP. 19541116 197703 1 004



Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.
NIP. 19681027 199403 1 003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri (Studi Kasus Putusan No. 608/Pdt.G/2014/PA.Sgm)**”, yang disusun oleh Muh. Wahid, NIM: 10100111033, mahasiswa Jurusan Peradilan Agama pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis tanggal 03 Desember 2015 M, bertepatan dengan 20 Shafar 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum, Jurusan Peradilan Agama.

Makassar, 14 Maret 2016 M
05 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Supardin, M. HI.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.	(.....)
Munaqisy II	: Dra. Nila Sastrawati, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT. MS.	(.....)
Pembimbing II	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اَللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala kemuliaan dan pujian, kekuatan dan kekuasaan, hidayah dan taufik adalah milik Allah swt. Tiada kemuliaan yang diberikan oleh Allah swt. Sesudah keimanan melainkan pemahaman dan iktikad baik dalam melaksanakan perintah Allah swt., maupun menjauhi larangan Allah swt. Sungguh suatu keberuntungan bagi orang yang senantiasa menghiasi hidupnya dengan berbagai aktifitas bermanfaat yang diiringi ketaatan dan permohonan kepada Allah swt. Ya Allah berikanlah kebahagiaan dan keselamatan bagi hamba-hamba-Mu yang senantiasa bekerja mencari ridha-Mu dalam melaksanakan tugas dan amanat yang diujikan kepadanya. Salam dan shalawat senantiasa dicurahkan kepada manusia termulia Muhammad saw., keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan Islam.

Kehadiran skripsi yang sangat sederhana ini merupakan hasil dari kerja panjang dan usaha maksimal yang dilakukan penulis dan didukung oleh berbagai pihak. Dengan penuh keterbatasan, penulis berusaha mengungkap hakikat utang suami isteri perspektif Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Sebagai wujud simpati, penulis menyampaikan penghargaan yang mendalam dan ucapan terima kasih yang tinggi kepada semua pihak yang telah membantu.

Dengan keterbatasan ruang, perkenankan penulis menyebutkan diantara mereka adalah sebagai berikut :

1. Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh Wakil Rektor, Kepala Biro AU dan AAK, serta segenap pejabat dan staf di lingkungan UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, beserta Dr. H. Abd. Halim Talli, M. Ag., Dr. Hamsir, SH., M. Hum., Dr. H. Muh. Shaleh Ridwan, M. Ag., masing-masing selaku Wakil Dekan I, II, dan III.
3. Dr. Supardin, M. HI., selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama, beserta Dr. Hj. Fatimah, M. Ag., selaku Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, dan Sri Hajati, S. HI., selaku Staf Jurusan Peradilan Agama.
4. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing, HT., MS., beserta Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan keikhlasan dan keilmuan senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa, beserta pejabat dan staf yang bersedia menerima penulis melakukan penelitian sekaligus memberikan informasi dan arahan terkait dengan penelitian penulis.
6. Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S. Ag., M. Ag., Sitti Rusiah, S. Ag., MH., dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S. HI., M. HI., masing-masing adalah Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa yang dengan penuh

keikhlasan, kesabaran, dan ketulusan membimbing penulis selama melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sungguminasa.

7. Kakanda La Ode Maskur, S.HI, MH., Andi Arwin, S.HI., Asrul, S.HI., Muhammad Saleh, S.HI, Herman, S.HI., Junaedi, S.HI., yang selama ini telah banyak memberikan ilmu serta pengalaman yang belum pernah penulis dapatkan sebelumnya.
8. Rekan-rekan seperjuangan di Jurusan Peradilan Agama angkatan 2011, terkhusus kepada Khaidir Hasram, Rusman, Zuhriatul Amin, Muh.Farid, Miftah Farid, Adriadi Asrul, Ibnu Izzah, dengan semangat kebersamaan mengikuti perkuliahan dengan baik tanpa melupakan suasana diskusi yang sering kali muncul humor dan canda yang membuat waktu perkuliahan tak terasa berlalu.
9. Rekan-rekan seperjuangan Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Syariah dan Hukum periode 2014/2015, beserta Pengurus Dewan Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar periode 2015/2016, yang selalu menjunjung kebersamaan dan solidaritas dalam mengembangkam amanah yang diberikan.
10. Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) angkatan ke-50 Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros, semangat kebersamaan dan kekeluargaan telah tersimpan di relung hati yang paling dalam.
11. Rekan-rekan seperjuangan di Komunitas Pecinta Alam (KOMPALA) Maros, beserta Sanggar Seni Budaya REAKSI Maros, yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman yang begitu berarti bagi penulis

selama melakukan KKN di Desa Marannu Kecamatan Lau Kabupaten Maros.

12. Penyemangat hati, Srikandi Syamsiah, Amd., Kep. dengan penuh keikhlasan selalu setia dan tulus melukis indahnya kebersamaan dengan penulis.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis persembahkan doa kepada kedua orang tua, Ayahanda Salatong dan Ibunda Hawia yang dengan kesederhanaan telah mengasuh, membesarkan, mendidik, memberi hikmah terhadap putra-putrinya. Semoga kesuksesan pemeliharaan dan pembinaan mereka dapat tertularkan kepada anak-anaknya untuk melahirkan cucu-cucunya yang shaleh dan shalehah.

Saudaraku tercinta, Jumasih dan Asriani yang selama ini telah banyak memberikan arahan, semangat, dan motivasi untuk terus melanjutkan pendidikan. Teristimewa kepada seluruh keluarga besar yang penulis sayangi. Doa dan dorongan mereka senantiasa menghiasi perjalanan hidup penulis.

Tiada yang dapat penulis ucapkan selain ungkapan terima kasih yang tak terhingga, serta panjatan doa kepada Allah swt. Segala usaha dan kerja penulis dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini senantiasa tercerahkan sehingga dapat terwujud karya monumental yang dapat berguna bagi pengembangan *khazanah* keilmuan.

Samata, 11 November 2015

Penulis

MUH.WAHID

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Perkawinan	11
B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri	15
C. Putusnya Perkawinan	18
D. Utang Piutang	23
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32

B. Pendekatan Penelitian	33
C. Metode Pengumpulan Data	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Instrument Penelitian	35
F. Tehnik Pengolahan dan Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Hutang Suami Isteri	37
B. Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Menyangkut Utang Pribadi	44
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Nama : Muh. Wahid

Nim : 10100111033

Judul : Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri (Studi Kasus Putusan Nomor 608/Pdt.G/2014/PA.Sgm)

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban mantan suami terhadap utang isteri? Pokok masalah tersebut selanjutnya dibagi beberapa submasalah atau pertanyaan, yaitu: 1) Bagaimanakah ketentuan hukum Islam mengenai utang suami isteri?, dan 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu cara pendekatan permasalahan yang diteliti berdasarkan pada aturan Undang-undang. Selanjutnya berdasarkan data yang ada penyusun berusaha menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus menjadi sebuah kesimpulan yang lebih umum.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain, bahwa pertanggungjawaban utang sesuai dengan aturan dalam Kompilasi hukum Islam yaitu, utang yang dibuat semasa perkawinan meskipun dibuat untuk kepentingan pribadi tetap dibebankan kepada suami. Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa pertanggungjawaban utang untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Hakim menetapkan harta bersama yang sudah dijual dibagi dua lagi sementara uang hasil jual tersebut sudah dipakai untuk membayarkan ganti rugi pada saat suami kecelakaan. Sehingga hakim memutus utang yang dibuat untuk kepentingan pribadi tetap tanggungjawab suami.

Implikasi dari penelitian ini adalah Pertanggungjawaban utang bersama yang dibuat untuk kepentingan pribadi yang dibuat pada saat masih status suami isteri harus ditanggung bersama juga, namun pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut hanyalah sebagai dasar secara umum. Pertanggungjawaban utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga seringkali dibenturkan dalam kasus-kasus tertentu, dengan melihat kenyataan bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa ini dimana sang isteri berutang untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. Mengenai hal tersebut dimungkinkan untuk pertanggungjawaban utang dengan porsi yang berbeda berdasarkan posisi kasusnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang hakekatnya selalu berusaha untuk berinteraksi atau menjalin hubungan dengan sesamanya. Hubungan ini pada akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok yang terdiri dari manusia itu sendiri baik dari jumlah yang paling kecil yaitu keluarga maupun suatu komunitas besar sebagai masyarakat dalam sebuah negara.¹ Sebuah keluarga terbentuk dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Perkawinan merupakan ikatan antara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan. Perbedaan itu dapat dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), pendidikan dan lain sebagainya. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.

Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama yang diatur dalam aturan hukum (syari'at). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 menguraikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, berdasarkan

¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 61.

Ketuhanan Yang Maha Esa,² berarti terciptanya hubungan antara suami dengan isteri dengan baik, yang dilandasi prinsip-prinsip pergaulan yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenang dan tenteram), *mawaddah* dan *rahmah* (kasih sayang). Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ar-Rum/30:21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Definisi perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jauh lebih representatif dan lebih jelas serta tegas dibandingkan dengan definisi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merumuskan sebagai berikut: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan*

² UU. RI. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2007), h. 2.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemahan*, h. 406.

ghalizhan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Adapun dilihat dari segi agama, khususnya Islam, pernikahan memiliki kedudukan yang sangat terhormat dan dianggap sakral. Berlainan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan tidak hanya persolan perbuatan hukum dan memiliki penghargaan sosial di mata masyarakat. Akan tetapi, lebih dari itu pernikahan juga memiliki nilai-nilai ibadah. Itulah sebabnya mengapa terkadang banyak orang mengalami kesulitan untuk membedakan pernikahan dari sudut pandang agama dan hukum Islam. Sebab dalam Islam hukum itu hanya merupakan salah satu aspek atau salah satu komponen (elemen) saja dari system ajaran Dinul Islam secara keseluruhan. Berlainan dengan paham penganut agama lain yang memandang hukum sebagai sesuatu yang ada di luar agama.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 diuraikan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h. 114.

itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Telah ditegaskan bahwa perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan, baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandang hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistemik dan abadi. Karena sebelum melangsungkan akad nikah, sepasang calon pengantin diperintahkan untuk melakukan kegiatan yang dinamakan dengan serangkaian pendahuluan nikah (muqaddimah nikah atau muqaddimah az-zawaj). Adapun sistemik dan abadi mengingat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pernikahan bersifat kumulatif antara yang satu dengan yang lain. Dan semua langkah-langkah itu disyariatkan, tampak mengacu kepada tujuan utama dan pertama syariat pernikahan itu sendiri, yakni mewujudkan keluarga bahagia yang abadi.

Suatu perkawinan menyebabkan terjadinya hubungan hukum antara seorang laki-laki (sebagai suami) dan seorang perempuan (sebagai isteri). Akibat selanjutnya adalah timbulnya hak dan kewajiban antara suami isteri secara seimbang. Suami sebagai kepala keluarga sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin. Suami harus melindungi isterinya dan isteri wajib mengatur urusan rumah tangga atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Namun dalam kenyataannya prinsip-prinsip berumah tangga tersebut selalu tidak dilaksanakan secara maksimal, sehingga suami dan isteri tidak lagi merasa tenang dan tenteram serta hilang rasa kasih sayang dan tidak lagi saling cinta mencintai satu sama lain, yang akibat lebih jauh adalah terjadinya perceraian.

Dalam Islam, perceraian merupakan pilihan sehingga Allah swt memandangnya sebagai sesuatu yang dibenci meski halal. Perceraian membawa akibat tidak hanya terhadap kedua belah pihak, tetapi juga terhadap anak serta harta benda dalam perkawinan. Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, harta benda dalam perkawinan dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu harta bersama dan harta bawaan yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika ikatan perkawinan tersebut terpaksa putus, maka harta bersama harus dibagi dua, antara suami dan isteri, termasuk utang piutang yang menjadi harta bersama atau pembebanan harta bersama atas utang suami atau isteri.

Dari ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat dipahami bahwa harta dalam perkawinan terdiri dari harta bersama dan harta pribadi masing-masing suami dan isteri. Harta bersama jika dikaitkan dengan hukum Islam terdapat dalam pembahasan mengenai perkongsian dalam pandangan Islam dengan istilah syirkah. Adapun yang termasuk harta bersama adalah seluruh harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan dan hasil dari harta bersama.

Setelah proses perceraian terjadi, masih banyak hak dan kewajiban yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak, tidak terkecuali tentang pembagian harta bersama. Dalam pembagian harta bersama tidak selamanya berjalan mulus. Terkadang pembagian harta bersama tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga pembagian harta bersama dilakukan dengan proses peradilan atau litigasi.

Perkembangan yang pesat dibidang ekonomi dan perdagangan membuat semakin bermacamnya harta yang diperoleh dalam kehidupan berumah tangga. Bermacam bentuk harta bersama juga disebutkan dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu dapat berupa harta berwujud maupun harta tidak berwujud, yang berupa surat-surat berharga, hak-hak maupun kewajiban (kredit/utang).

Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya utang piutang pada pihak ketiga dan untuk pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, begitupula dengan pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Atas dasar tersebut di atas, penulis mengambil judul “Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri (studi kasus perkara Nomor 608/Pdt.

G/2014/PA. Sgm), tentang tanggungjawab mantan suami terhadap utang yang dibuat oleh isteri untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. Dalam perkara ini hakim memutuskan utang yang dibuat oleh isteri ditanggung 1/2 oleh suami.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, yang menjadi pokok masalah adalah “bagaimanakah tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri?”. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan beberapa sub masalah yang sesuai dengan judul di atas yaitu:

1. Bagaimanakah ketentuan hukum Islam mengenai utang suami isteri ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, diperlukan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan judul skripsi yakni: ***Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri.***

Tanggungjawab adalah beban yang sifatnya moral. Artinya, sejak lahirnya kewajiban (beban yang sifatnya kontraktual atau lahir dari perjanjian) sudah lahir pula tanggungjawab. Dalam skripsi ini kata tanggungjawab diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan mantan suami terhadap utang isteri.

Mantan suami dalam skripsi ini adalah seorang laki-laki yang pernah terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan (mantan isteri).

Utang adalah sesuatu yang dipinjam dari orang lain dengan perjanjian akan dikembalikan atau dibayar sama sesuai dengan sesuatu itu.⁵ Sesuatu yang dimaksud mempunyai makna luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa saja dalam bentuk barang.

2. *Deskripsi Fokus*

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa melalui wawancara langsung dengan hakim dan para pihak yang terkait menyangkut masalah penelitian yang akan diteliti serta mengambil data-data lainnya yang dianggap penting.

D. **Kajian Pustaka**

Untuk memperoleh gambaran yang pasti terhadap posisi penelitian ini, di antara karya-karya yang ada, berikut ini akan penulis ilustrasikan tentang penelitian-penelitian yang sudah ada dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu sebagai berikut:

Dalam skripsi yang disusun oleh Dodi Hartanto yang berjudul “Utang Suami Isteri Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan”. Dalam skripsi ini, Dodi Hartanto membahas proses perceraian yang disebabkan

⁵Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h. 136.

utang suami isteri. Sedangkan dalam penelitian ini, penulis lebih fokus kepada pertanggungjawaban utang setelah terjadi perceraian.⁶

Dalam skripsi lain yang disusun oleh Vega Yurisdiah, dengan mengambil judul “Proses Pembagian Harta Bersama Ketika Ada Utang Suami Isteri”. Disini hanya fokus terhadap proses pembagian harta bersama ketika ada utang.⁷

Berdasarkan contoh dari beberapa literatur tersebut, penyusun mencoba mengangkat masalah tanggung jawab mantan suami terhadap utang isteri. Sehingga sejauh pengamatan penulis, judul ini belum pernah dibahas oleh siapa pun dalam bentuk skripsi, tesis, atau disertasi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum Islam mengenai utang suami isteri.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penyelesaian sengketa tanggungjawab mantan suami terhadap utang isteri.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dapat menambah ilmu pengetahuan terutama dibidang hukum perdata.
2. Dapat menjadi pelajaran terutama untuk mahasiswa hukum agar dapat mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap pembagian harta bersama yang menyangkut utang pribadi.

⁶Dodi Hartanto, *“Utang Suami Isteri Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan”* (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009)

⁷Vega Yurisdiah. *“Proses Pembagian Harta Bersama Ketika Ada Utang Suami Isteri”* (Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010)

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi perkawinan atau pernikahan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 1 tersebut dijelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.⁸

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, isteri, dan

⁸Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 9.

anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama. Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami dan isteri dalam rumah tangga. Kekal artinya berlangsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak, melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk beradab. Karena itu perkawinan dilakukan secara berkeadaban pula, sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.⁹

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Dalam hukum adat mengatur kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan akhirat. Perkawinan dalam arti perikatan adat adalah

⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perkawinan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 75.

perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹⁰

Sedangkan menurut hukum Agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Dilihat dari segi keagamaan, perkawinan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Oleh karena itu, setiap Agama tidak membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.¹¹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan dianjurkan oleh Agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), h.8.

¹¹Hilman Hadikusuma, h. 10.

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah swt. dan juga Nabi Muhammad saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S An-Nur/24:32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) diantara hamba-hamba sahayanya yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya”.¹²

Dalam kompilasi hukum Islam, telah diatur tentang dasar perkawinan.

Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut :

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.320.

Pasal 4

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹³

Perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat. Yang dimaksud dengan syarat yaitu segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan Undang-undang. Ada dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat material dan formal. Syarat material yaitu syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan (syarat subjektif). Sedangkan syarat formal yaitu tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum Agama dan Undang-undang (syarat objektif).¹⁴

B. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dalam perkawinan suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang harus seimbang agar terciptanya keluarga yang harmonis. Adapun hak dan kewajiban suami isteri yang diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi :

1. Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

¹³ Departemen Agama, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta :Pembinaan kelembagaan agama islam, 1997) h. 14

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, h.76.

3. Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 33 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain.

Selain kewajiban suami yang merupakan hak isteri, maka hak suami pun ada yang merupakan kewajiban isteri. Hal ini diatur dalam pasal 34 Undang-undang perkawinan yang secara umum dan rinci (khusus) diatur dalam pasal 83 dan 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kewajiban suami terhadap isteri tidak berlaku apabila isteri *nusyuz*. Tolak ukur mengenai isteri yang *nusyuz* yaitu sang isteri membangkang terhadap suaminya, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak berhubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan hukum Islam, dan/atau isteri keluar meninggalkan rumah tanpa seizin suaminya.¹⁵

Salah satu tanggungjawab suami terhadap isteri dan keluarganya yaitu memberi nafkah lahir dan batin (ketentraman dan keamanan) sesuai dengan kemampuannya. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S At-Thalaq/65:7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ

اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 51.

Terjemahnya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹⁶

Jika suami tidak mampu menafkahi isteri, maka gugurlah haknya untuk melakukan hubungan dengan isterinya, dengan alasan nafkah merupakan pertimbangan kesenangan hubungan suami isteri yang didasari oleh ketentuan bahwa isteri yang *nusyuz* tidak berhak menerima nafkah dari suaminya. Jika seorang perempuan ketika menikah mengetahui bahwa suaminya dalam kesulitan, atau semula dalam keadaan mampu kemudian karena sesuatu hal bangkrut, maka isteri tidak boleh menuntut *fasakh*. Namun, bila ia tidak mengetahui sebelumnya, isteri boleh mengajukan *fasakh*. Bila dihubungkan dengan pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:

- a. Petanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
- b. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan keada harta bersama.
- c. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.946.

- d. Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi, dibebankan kepada harta isteri.

C. Putusnya Perkawinan

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tidak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau isteri untuk menyelesaikan permasalahannya.

Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga. Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.

Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu, akan tetapi ternyata untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan. Karena manakala setelah perkawinan itu dijalani, banyak onak dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang, maka biduk yang bernama rumah tangga itu pun kerap tenggelam dan lahirnya karam. Maka ketika biduk perkawinan telah usai, dan penumpangnya bercerai berai, yang tersisa

tinggallah puing-puing permasalahan dan yang paling menderita akibat karamnya sebuah biduk perkawinan adalah anak.

Bila suatu perkawinan putus, maka ada hukum yang berlaku sesudahnya, yaitu:

1. Hubungan antara keduanya berlaku seperti antara dua orang asing. Putusnya perawinan mengembalikan status halal yang tadinya didapat melalui akad nikah menjadikan kembali pada status semula yaitu haram, tidak boleh berpandangan, bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami isteri yang sebutannya menjadi perbuatan zina.
2. Adanya suatu keharusan suami memberi mut'ah kepada isteri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Namun dalam memberikan mut'ah ini dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat. Golongan Zahiriyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya wajib. Sebagaimana firman Allah dalam Q. S. Al-Baqarah:2:241.


 وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah ada pemberian dalam bentuk mut'ah secara patut, merupakan hak atas orang yang bertaqwa”.¹⁷

Golongan ulama Malikiyah berpendapat bahwa mut'ah itu hukumnya sunnah, dengan alasan karena lafadz *haqqan alal muttaqin* itu tidak menunjuk

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 946.

wajib. Golongan lain mengatakan bahwa kewajiban memberi mut'ah itu berlaku tergantung pada keadaan tertentu. Dalam hal tertentu pun terjadi perbedaan pendapat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa hukumnya wajib untuk suami yang akan menceraikan isterinya sebelum digauli dan maharnya belum ditentukan sebelumnya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat bahwa mut'ah itu hanya wajib diberikan oleh suami yang menghendaki perceraian, seperti talak.

1. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayar ketika sedang dalam ikatan perkawinan, berupa maskawin atau nafkah.
2. Adanya iddah yang berlaku atas isteri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup ataupun cerai akibat ditinggal mati oleh suaminya, sedang dalam keadaan mengandung (hamil) ataupun wajib menjalani masa iddah.
3. Adanya akibat hukum bagi pemeliharaan anak.

Perceraian dalam suatu perkawinan bagi sebagian pasangan suami isteri merupakan suatu malapetaka bagi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Karena tidak ada pasangan yang melakukan perkawinan sejak semula mempunyai keinginan perceraian. Akan tetapi, bagi pasangan suami isteri yang dalam kehidupan rumah tangganya mengalami ketidak harmonisan, perceraian merupakan cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan atau setidaknya melepaskan diri dari penderitaan yang dialami dalam rumah tangga.

Perceraian juga dapat menimbulkan akibat terhadap harta kekayaan dalam perkawinan. Dalam suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam rumah tangga, demikian pula dengan putusannya ikatan

perkawinan juga mengakibatkan adanya hak dan kewajiban bagi mantan suami dan mantan isteri. Jika perkawinan yang sah akan berakibat timbulnya hubungan hukum suami dan isteri mengenai harta benda dalam perkawinan.¹⁸

Dalam perceraian, masalah yang sering menjadi isi gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama yaitu masalah harta, baik harta bawaan maupun harta bersama. Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami isteri setelah berlangsungnya perkawinan, suami dan isteri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada isterinya atas nama *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan isteri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali dalam bentuk *syirkah*, yang untuk itu dilakukan dalam suatu akad khusus. Tanpa akad tersebut, harta suami isteri tetap terpisah.

Berbagai pendapat tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, mengenai status dan keberadaan harta bersama dalam perkawinan. Begitu juga dengan pengertian harta bersama yang dikemukakan oleh para pakar hukum.

Harta bersama dalam khazanah fiqh Islam memang pada dasarnya tidak populer, sehingga tidak ada pembahasan khusus dalam fiqh. Namun di Indonesia, harta sejenis ini memang dikenal dan ada hampir disemua daerah. Saat ini peraturan mengenai harta bersama ini masih berlaku pembagian sama yang

¹⁸ Muhammad Amin, *Utang Piutang dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 48.

didapat oleh suami maupun isteri tanpa melihat apakah dan siapakah yang paling banyak menghasilkan *income* selama berumah tangga.

Harta bersama dalam perkawinan dapat terjadi dan hanya mungkin dalam bentuk *syirkah* antara suami isteri, baik dibuat saat berlangsungnya akad nikah atau sesudahnya dan adanya perjanjian yang dibuat untuk itu pada waktu berlangsungnya akad nikah.¹⁹

Segala harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan diluar harta warisan, hibah, dan hadiah merupakan harta bersama. Berbeda dengan harta yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum akad nikah, harta tersebut digolongkan ke dalam harta asal atau harta bawaan. Harta bawaan akan diwariskan oleh masing-masing keluarganya apabila pasangan suami isteri tersebut meninggal dan tidak punya anak.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian sering juga terkait dengan pihak ketiga. Dapat dijelaskan dengan menggunakan konstruksi peristiwa hukum dalam hubungannya dengan pihak ketiga tersebut. Perceraian secara yuridis sudah sah sejak saat keputusan Pengadilan mengenai dikabulkannya gugatan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Akan tetapi, secara empiris, belum tentu penyelesaian harta benda perkawinan sudah dilaksanakan. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, yaitu piutang atau tagihan pihak ketiga kepada suami isteri yang putus perkawinannya karena perceraian.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 176.

Setelah perceraian terjadi, piutang atau tagihan pihak ketiga yang perikatannya disepakati setelah perceraian terjadi, berarti setelah ikatan perkawinan putus, maka status masing-masing secara yuridis sudah menjadi bekas suami atau bekas isteri. Piutang atau tagihan tersebut di atas menjadi utang pribadi masing-masing bekas suami atau bekas isteri tersebut.

D. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit tidak jauh beda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Selain itu, utang piutang sangat terkait dengan pemberian pinjaman dari pihak lain sebagai metode transaksi ekonomi di masyarakat. Sedangkan kredit secara umum lebih mengarah pada pemberian pinjaman dengan penambahan nilai dalam pengembalian. Hal ini dikarenakan istilah kredit lebih banyak digunakan dalam dunia perbankan.

Sedangkan dalam terminologi fiqh mu'amalah, utang piutang disebut dengan "*dain*" (دين). Istilah "*dain*" (دين) ini juga sangat terkait dengan istilah

“*qard*” (قرض) yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Dari sini nampak bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara “*dain*” (دين) dan “*qard*” (قرض) dalam bahasa fiqh mu’amalah dengan istilah utang piutang dan pinjaman dalam bahasa Indonesia. Berdasarkan pemikiran di atas, maka dalam mengkaji masalah utang piutang, kredit, pinjaman, pembiayaan ataupun *qard* harus dijelaskan satu persatu agar jelas perbedaan dan persamaannya.

Pertama, dalam terminologi fiqh mu’amalah, pinjaman yang mengakibatkan adanya utang disebut dengan “*qard*” (قرض). *Qard* (قرض) dalam pengertian fiqh diartikan sebagai perbuatan memberikan hak milik untuk sementara waktu oleh seseorang pada pihak lain dan pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan tanpa mengambil imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi pinjaman

Kedua, dalam bahasa perbankan pemberian utang atau pembiayaan disebut dengan “kredit”. Kata “kredit” secara kebahasaan berasal dari kata *credo* yang dalam pengertian keagamaan berarti kepercayaan. Adapun pengertian kata *credo* yang terkait dengan masalah *financial* adalah memberikan pinjaman uang atas dasar kepercayaan.²⁰

Utang dalam pengertian masyarakat berarti menerima pinjaman dari pihak lain yang harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang dilakukan

²⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hal. 109

ketika transaksi. Secara umum, ketiga istilah di atas tidak mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan istilah antara utang, kredit, dan dain hanya perbedaan bahasa saja yang dalam pengertian umum masyarakat tidak berbeda. Sedangkan perbedaan antara pinjaman, pembiayaan, dan *qard* (قرض) juga demikian.

Adanya perbedaan pengertian yang disampaikan oleh para pakar hukum, baik pakar hukum Islam, maupun para pakar perbankan di dunia dan Indonesia tidak menunjukkan adanya perbedaan pemaknaan. Perbedaan yang terjadi biasanya hanya dalam redaksional pemberian definisi saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pengertian *qard* yang disampaikan beberapa pakar hukum Islam (*fuqaha* ') sebagai berikut;

- a. Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* memberikan definisi *qard* sebagai harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman kepada penerima dengan syarat penerima pinjaman harus mengembalikan besarnya nilai pinjaman pada saat mampu mengembalikannya.²¹
- b. Berbeda dengan pengertian-pengertian di atas, Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan utang piutang dengan akad yang dilakukan oleh dua orang di mana salah satu dari dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan barang tersebut senilai dengan apa yang diambilnya dahulu. Berdasarkan pengertian ini maka “*qard*” (قرض)

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta Timur : Pena Publishing, 1994), hal. 144

memiliki dua pengertian yaitu; “*i’arah*” (اعارة) yang mengandung arti *tabarru’* (تبرع) atau memberikan harta kepada orang dasar akan dikembalikan, dan pengertian *mu’awadlah*, (معاوضة) karena harga yang diambil bukan sekedar dipakai kemudian dikembalikan, tetapi dihabiskan dan dibayar gantinya.²²

2. Dasar Hukum Utang Piutang

Utang piutang secara hukum dapat didasarkan pada adanya perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup dengan saling tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Ma’idah/5:2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

Terjemahnya :

Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa, dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya.”²³

Dalam transaksi utang piutang terdapat nilai luhur dan cita-cita sosial yang sangat tinggi yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Dengan demikian, pada dasarnya pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus didasari niat yang tulus sebagai usaha untuk menolong sesama dalam kebaikan. Ayat ini berarti juga bahwa pemberian utang atau pinjaman pada seseorang harus

²² TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), hal. 144

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.156.

didasarkan pada pengambilan manfaat dari sesuatu pekerjaan yang dianjurkan oleh agama atau jika tidak ada larangan dalam melakukannya.

Selanjutnya, dalam transaksi utang piutang Allah memberikan rambu-rambu agar berjalan sesuai prinsip syari'ah yaitu menghindari penipuan dan perbuatan yang dilarang Allah lainnya. Pengaturan tersebut yaitu anjuran agar setiap transaksi utang piutang dilakukan secara tertulis. Ketentuan ini sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah ayat /2:282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ ...

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertransaksi atas dasar utang dalam waktu yang telah ditentukan, tulislah. Hendaklah seorang penulis diantaramu menulis dengan benar, dan janganlah dia enggan menulisnya sebagaimana yang telah diajarkan Allah”.²⁴

Karena pemberian utang pada sesama merupakan perbuatan kebajikan, maka seseorang yang memberi pinjaman, menurut pakar hukum Islam, tidak dibolehkan mengambil keuntungan (*profit*). Yang menjadi pertanyaan selanjutnya, keuntungan apa yang diperoleh pemberi utang atau pemberi pinjaman? Tentang hal ini, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al-Hadid/57:11:

²⁴ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.70.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

“Barang siapa yang meminjami Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan baginya dan di sisi-Nya pahala berlimpah dan lebih mulia”.²⁵

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an sebagaimana di atas, pemberian utang atau pinjaman juga didasari Hadiîs Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah sebagai berikut;

ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة

Artinya :

“Barang siapa yang memberikan pinjaman pada seorang muslim dua kali maka tidak lain pahalanya kecuali seperti pemberian shadaqah satu kali”.

Dalam sabda Rasulullah yang lain, Ibnu Majah juga meriwayatkan sebagai berikut;

رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَ الْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جَبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَ عِنْدَهُ وَ الْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

Artinya :

“Saya melihat pada waktu di-isra’-kan, pada pintu surga tertulis “Pahala shadaqah sepuluh kali lipat dan pahala pemberian utang delapan belas kali lipat” lalu saya bertanya pada Jibril “Wahai Jibril, mengapa pahala pemberian utang lebih besar?” Ia menjawab “Karena peminta-minta

²⁵ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.902.

sesuatu meminta dari orang yang punya, sedangkan seseorang yang meminjam tidak akan meminjam kecuali ia dalam keadaan sangat membutuhkan”.

Di sisi lain, Allah memberikan aturan yang tegas dalam utang piutang yang merupakan bagian dari transaksi ekonomi (mu'amalah maliyah). Ketegasan aturan transaksi ekonomi tersebut tercermin dalam Firman Allah Q.S An-Nisa'/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta yang beredar diantaramu secara bathil, kecuali terjadi transaksi suka sama suka. Jangan pula kamu saling membunuh. Allah sangat sayang kepadamu semuanya.”²⁶

Mengenai utang dalam perkawinan, oleh Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 34), dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu utang pribadi (utang *prive*) dan utang persatuan (utang *gemeenschap*, yaitu suatu utang untuk keperluan bersama).

Menurut Subekti, untuk suatu utang pribadi harus dituntut suami atau isteri yang membuat utang tersebut, sedangkan yang harus disita pertama-tama adalah benda *prive* (benda pribadi). Apabila tidak terdapat benda pribadi

²⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.122.

atau ada tetapi tidak mencukupi, maka dapatlah benda bersama disita juga. Akan tetapi, jika suami yang membuat utang, benda pribadi isteri tidak dapat disita, dan begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat hutang itu disita pula.²⁷

Dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila suami atau isteri tidak dapat melunasinya, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).

Utang pribadi merupakan utang yang dibuat oleh suami atau isteri untuk keperluan pribadinya yang pertanggungjawabannya dibebankan kepada suami atau isteri yang membuat perikatan (perjanjian). Hal ini bisa terjadi karena masing-masing suami isteri cakap melakukan perbuatan hukum, lain

²⁷ Prof. Subekti, S.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Intermasa, 2003), 34

halnya dengan utang bersama. Dimana utang bersama merupakan utang yang dibuat oleh suami atau isteri selama dalam ikatan perkawinan yang digunakan untuk keperluan rumah tangga itu menjadi utang bersama. Untuk melunasi utang bersama itu dibebankan kepada harta bersama, dan apabila harta bersama tidak cukup, maka dibebankan kepada harta suami atau harta isteri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini menginterpretasikan atau menterjemahkan dengan bahasa penelitian tentang hasil penelitian yang diperoleh dari informan di lapangan sebagai wacana untuk mendapatkan penjelasan tentang kondisi yang ada dengan menghubungkan variabel-variabel dan selanjutnya akan diihasilkan deskripsi tentang objek penelitian.²⁸

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu riset, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha mendeskripsikan atau menganalisis tentang Tanggungjawab Mantan Suami Terhadap Utang Isteri. Oleh sebab itu hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) h. 18.

gambaran yang utuh baik tentang kompetensi-kompetensi tertentu, dengan tujuan peneliti ingin memperoleh pemahaman dibalik fenomena yang berhasil didapat oleh peneliti.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Sungguminasa.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis,

Pendekatan yuridis yaitu suatu metode atau cara yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku yang memiliki korelasi dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Syari'I

yaitu pendekatan terhadap hukum islam yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk menunjang pembahasan ini diperlukan data yang cukup sebagai bahan analisis. Selanjutnya untuk menjaring data yang diperlukan, maka digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara yaitu suatu cara penumpulan data dengan mengadakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan hakim, dan para pihak yang terkait.

2. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati, mengkaji dan mempelajari buku-buku, dokumen serta arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.²⁹

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam peneltiian ini yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan hakim dan para pihak yang secara langsung terkait dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen yang telah tersedia pada instansi atau lembaga tempat penelitian.

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1986), h.172.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yaitu suatu alat pengumpul data. Adapun alat-alat yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa daftar pertanyaan.
2. Buku Catatan dan alat tulis berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.
3. Kamera berfungsi untuk memotret jika sedang melakukan wawancara dengan informan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut: identifikasi data yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul masih berupa bahan mentah maka pengolahan data selanjutnya, dilakukan dengan metode editing, yaitu memeriksa dan menempatkan data tersebut kedalam kerangka

pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan rumusan masalah agar dapat dipertanggung jawabkan.

2. Analisis Data

Tehnik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih miliknya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Islam Mengenai Hutang Suami Isteri.

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 yang merupakan *spirit of the age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal wajar untuk mewujudkan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga, serta pada masa kini telah membawa kesadaran moral untuk mewujudkan persamaan kedudukan suami isteri sebagai hasil perjuangan emansipasi yang telah berlarut-larut.

Dalam sebuah perkawinan seringkali ditemukan adanya utang piutang pada pihak ketiga dan untuk pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, begitupula dengan pertanggungjawaban utang terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama dan apabila harta bersama tidak

mencukupi untuk membayar utang-utang tersebut maka akan dibebankan pada harta suami dan jika harta suami tidak mencukupi juga maka akan dibebankan pada harta isteri (Pasal 93 ayat (1), (2), (3), dan (4)).

Dari apa yang dikemukakan di atas mengenai pelaksanaan kekuasaan suami atau isteri selama masih dalam ikatan perkawinan ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka suami atau isteri memiliki kekuasaan yang sama dan seimbang.

Berdasarkan dengan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang menyangkut dengan tanggungjawab terhadap utang akibat dari putusnya perkawinan. Maka dengan melihat tempat tinggal para pihak yang berperkara berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sungguminasa yang terdaftar dikepaniteraan dengan nomor perkara 608/Pdt. G/2014/PA.Sgm. Mengenai duduk perkara, fakta-fakta serta pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim untuk memutus perkara tersebut, akan diuraikan sebagai berikut:

1. Kasus Pososi

Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 8 Mei 2003 di Kabupaten Gowa, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 100/09/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa tanggal 25 Mei 2003. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga di Kabupaten Gowa selama 11 tahun dan dikaruniai 4 orang anak. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian di

Pengadilan Agama Sungguminasa, berdasarkan Akta Cerai Nomor 137/AC/2014/PA. SGM.

Selama membina rumah tangga selama 11 tahun, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama antara lain sebagai berikut:

- a. Satu unit rumah beserta tanahnya di jalan Poros Pallanga Kelurahan Mangngalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dibeli pada tahun 2005, dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah milik Pak Arsyad
 - Sebelah Timur : Rumah kosong
 - Sebelah Selatan : Jalan/lorong
 - Sebelah Barat : Rumah milik Ismail Kadir
- b. Satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang dibeli pada tahun 2007.

Bahwa rumah dan tanahnya serta motor telah dijual untuk membayar ganti rugi sewaktu Tergugat mengalami kecelakaan.

Bahwa Tergugat adalah kepala teknisi tambang pada PT. GCO. Resource di Kendari yang berpenghasilan Rp. 25 juta perbulan. Selain itu, Tergugat juga memiliki tambang pasir yang beromset Rp. 60 Juta perbulan.

Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat selalu mengirim uang Rp. 4,5 juta perbulan.

Bahwa Penggugat sering berutang ke tetangga, dan uang tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi bersama orang lain.

Bahwa menurut Tergugat, selama Tergugat bekerja di Kendari, Penggugat sering keluar malam bersama laki-laki lain.

Selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan puncak perselisihan itu terjadi pada bulan September 2011, saat Tergugat mempertanyakan mengenai utang Penggugat kepada tetangga sebesar Rp. 40 juta. Penggugat malah marah dan mengatakan ambil saja semua anak-anakmu karena Penggugat mau pergi. Setelah itu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat menuju rumah orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk membayar utang yang dibuat oleh Penggugat. Karena hasil dari penjualan rumah dan tanahnya serta sepeda motor, itu sepenuhnya digunakan oleh Tergugat

2. Tentang hukumnya

Dalam kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama Sunggumnasa, hakim berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan bahwa, Penggugat telah resmi bercerai dengan Tergugat, bahwa Penggugat berutang kepada tetangga selama masih dalam ikatan perkawinan, bahwa harta bersama yang dijual digunakan oleh Tergugat untuk ganti rugi saat kecelakaan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya.

Dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat harus ikut menanggung utang yang dibuat oleh Penggugat. Karena utang terjadi sewaktu masih dalam ikatan perkawinan.

Mengenai utang bersama tersebut diatas dan berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam bahwa utang bersama Penggugat dan Tergugat tersebut harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak berperkara atau dibebankan kepada harta bersama.

3. Dasar Pertimbangan Hakim

- a. Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat serta bukti-bukti dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat tidak dapat, membuktikan bahwa Penggugat sering keluar malam bersama laki-laki lain. Tanggungjawab suami terhadap isteri tidak berlaku apabila isteri *nuzyus*. Dalam kasus ini, Tergugat selain sebagai kepala teknisi proyek PT. GCO. Resource di Kendari yang gajinya Rp. 25 juta perbulan, Tergugat juga mempunyai tambang pasir yang omsetnya Rp. 60 juta perbulan. Sangat tidak wajar jika tiap bulan Tergugat hanya mengirim uang kepada Penggugat sebesar Rp. 4,5 juta, sementara Penggugat tinggal bersama keempat anaknya.
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat menyatakan dibawah sumpahnya bahwa uang hasil penjualan rumah dan tanah serta sepeda motor yang dijual sepenuhnya digunakan oleh Tergugat untuk membayar ganti rugi sewaktu kecelakaan. Oleh karenanya, kesaksian

para saksi Penggugat tersebut dapat diterima, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa uang hasil penjualan rumah dan tanah serta sepeda motor dipakai oleh Tergugat, padahal itu adalah harta bersama.

- c. Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi tergugat tentang uang hasil penjualan rumah dan tanah serta sepeda motor digunakan sepenuhnya oleh Tergugat sewaktu kecelakaan, bahwa pengakuan tersebut merupakan bukti yang sempurna dan dikuatkan dengan bukti- bukti sehingga rumah dan tanah serta sepeda motor tersebut telah terbukti kebenarannya sebagai harta bersama.

Menurut Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M. HI., salah seorang hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, menyatakan :

“Khusus perkara begini berarti kasuistis pada saat isteri berutang dia juga mengatas namakan suaminya, sesuai dengan pertimbangan hakim terhadap putusan ini. Dalil-dalil sanggahan Tergugat tidak benar yang mengatakan bahwa seorang isteri yang sering keluar malam bersama laki-laki lain tidak boleh mendapatkan pertanggungjawaban dari mantan suami, tapi menurut hukum tidak seperti itu karena Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut, yang bisa gugur itu hanya hak-haknya sebagai seorang isteri kalau misalnya si isteri pergi meninggalkan suaminya tapi belum tentu kenyataannya seperti itu”.³⁰

Sekarang muncul pertanyaan apakah dengan perbuatan yang tercela dilakukan oleh isteri dapat menggugurkan hak-haknya seperti memperoleh harta? Yang gugur itu hanya nafkah, harta tidak ada kaitannya, yang gugur itu adalah hak-haknya sebagai seorang isteri misalnya meminta nafkah atau dibiayai yang namanya nafkah mut’ah, kalau harta bersama tidak karena terpisah. Suami

³⁰Wawancara dengan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M. HI pada tanggal 8 Oktober 2015.

mempunyai kewajiban kepada isteri untuk memberikan nafkah atau kebutuhan sehari-hari tetapi kalau suaminya dapat membuktikan semua dalil-dalil maka semuanya itu akan gugur.

Dra. Hj. Murni Faried, MH., yang juga merupakan hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, menyatakan :

“Ketentuan Hukum Islam terlalu luas apabila ditinjau dari segi etimologis. Sesuai dengan peraturan sekarang yang berlaku di Indonesia, harta bersama berarti apa yang diperoleh suami isteri pada saat mulai akad nikah sampai putusnya perkawinan, dengan melihat Pasal 35 dan 36 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kecuali ada perjanjian sebelum perkawinan. Sedangkan dalam penerapannya bisa kita lihat dengan kepastian hukum dan kemanfaatannya, dengan adanya aturan bahwa harta bersama dibagi 1/2 untuk suami dan 1/2 untuk isteri”.³¹

Menurut Ir. Juanda Bin H. Lawa (Tergugat) :

“Putusan Pengadilan ini sangat tidak adil. Seharusnya dalam memutus perkara hakim harus proaktif untuk memeriksa perkara tersebut, pada dasarnya saya tidak mengerti sama sekali tentang hukum. Pada saat gugatan ini saya terima, saya katakan kalau gugatan ini salah alamat karena utang yang dibuat itu selain tanpa sepengetahuan saya, utang itu pun digunakan untuk kepentingan pribadi. Seandainya utang untuk kepentingan keluarga atau anak-anak saya, maka saya pasti membayar utang itu.”³²

Ir. Juanda Bin H. Lawa menambahkan :

“Masalah rumah dan tanahnya serta sepeda motor yang dijual yang saya gunakan untuk ganti rugi saat kecelakaan, itu bukan kehendak saya. Lagi pula saya kecelakaan sewaktu saya habis mengantar kakak ipar saya ke Bandara. Saya sangat menyayangkan karena utang yang dibuat untuk kepentingan sendiri ikut dibebankan kepada saya meskipun utang tersebut pada saat dia buat, saya tidak tahu menahu tentang utang tersebut.

³¹Wawancara dengan Dra. Hj. Murni Faried, MH pada tanggal 8 Oktober 2015.

³²Wawancara dengan Ir. Juanda Bin H. Lawa pada tanggal 12 Oktober 2015.

Sekarang saya harus membayar utang sebesar Rp. 20 juta, padahal saya juga harus membiayai keempat anak saya”.³³

B. Penerapan Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Yang Menyangkut Utang Pribadi.

Dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan aturan diatas maka kasus dengan nomor 608/Pdt.G/2104/PA.Sgm. ini bisa terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa karena kasus yang disengketakan merupakan harta kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama yang menjadi alasan pertanggungjawaban tentang utang pribadi.

Dalam Pasal 1 huruf f KHI yang berbunyi : harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Harta yang diperoleh selama mulai dari akad nikah itu semua sudah merupakan harta bersama, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada pasal 93 KHI juga menyebutkan bahwa pertanggungjawaban utang terhadap utang suami isteri dibebankan pada hartanya masing-masing, pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, bila harta bersama tidak

³³Wawancara dengan Ir. Juanda Bin H. Lawa pada tanggal 12 Oktober 2015.

mencukupi dibebankan kepada harta suami, bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Untuk itu pada perkara Nomor 608/Pdt.G/2014/PA.Sgm. ini terkait dengan pasal tersebut diatas karena harta bersama tetap dibagi 1/2 : 1/2 untuk mantan suami isteri dan utang yang dibuat oleh mantan isteri untuk kepentingan sendiri tetap dibebankan kepada mantan suami meskipun utang yang dibuat tersebut untuk kepentingan sendiri.

Zulfikar, MH., hakim Pengadilan Agama Takalar, menyatakan :

“pada saat utang itu dibuat oleh isteri, suami diatas namakan juga. Jadi pada saat isteri lari maka si suami yang dikejar-kejar untuk membayar utang-utang isterinya. Pada dasarnya dan sesuai dengan aturan bahwa meskipun utang yang dibuat isteri tanpa sepengetahuan suami tetap harus dibebankan kepada suami karena merupakan utang bersama yang terjadi pada saat masih status suami isteri. Kita harus benar-benar melihat pertimbangan hukumnya karena itu merupakan keadilan”.³⁴

Dra. Hj. Murni Faried, MH. juga menambahkan bahwa :

“dalam penerapannya bisa kita lihat dengan kepastian hukum dan kemanfaatannya, dengan adanya aturan bahwa harta bersama dibagi 1/2: 1/2 untuk suami dan isteri tetapi ada hal-hal khusus kadang aturan itu tidak berlaku tergantung dari situasionalnya juga, sama halnya dengan utang, apabila utang tersebut dibuat pada masa masih status suami isteri maka utang tersebut adalah utang bersama yang harus ditanggung bersama juga meskipun utang itu dibuat oleh isteri tanpa diketahui suami”.³⁵

Dr. Anshori Ilyas, SH., MH., dosen hukum keperdataan Universitas

Hasanuddin, berbeda dengan pendapat yang sebelumnya. Beliau menyatakan :

“apabila isteri berutang maka harus sepengetahuan suami karena ini merupakan harta kekayaan maka dalam harta kekayaan ini ada yang dikatakan dengan harta bersama, harta bawaan dan harta pribadi. Dalam

³⁴Wawancara dengan Zulfikar, MH pada tanggal 15 Oktober 2015.

³⁵Wawancara dengan Dra. Hj. Murni Faried, MH pada tanggal 16 Oktober 2015.

kenyataan ini ada yang dinamakan Balireso yang artinya suami bekerja diluar dan isteri menjaga rumah dan mengurus semua urusan rumah tangga maka hasil dari suami itu merupakan hasil dari isteri juga. Dalam hal yang seperti ini ada yang dinamakan harta gono gini atau harta bersama, jadi kalau bercerai maka harus dibagi sama-sama juga. Dan kalau masalah utang yang penting suami ketahui bahwa isterinya berutang dan kalau utang itu untuk kepentingan keluarga suami akan ikut bertanggungjawab atas utang tersebut”.³⁶

Beliau juga menambahkan :

“kalau isteri berutang dan diketahui oleh suami maka suaminya harus ikut bertanggungjawab terhadap utang yang dibuat isteri. Ini merupakan hal yang sangat kasuistis, pada saat isteri berutang suami sama sekali tidak mengetahuinya padahal pada dasarnya apabila sudah ada hubungan hukum maka seharusnya apa yang dilakukan oleh sang isteri atau suami maka harus diketahui satu sama lain. Seharusnya dalam Pengadilan hakim harus betul-betul jeli apakah harta yang dituntut tersebut masih ada atau sudah terjual untuk bayarkan utang-utangnya sendiri. Intinya dalam kasus ini suami tidak mengetahui utang tersebut maka suami bisa lepas tanggungjawab untuk bayarkan utang tersebut”.³⁷

Tujuan hidup kita didunia dan akhirat ingin tenteram dan sejahtera bukan untuk dikejar-kejar karena utang, menjadi seorang manusia jangan cuma ingin haknya tapi tidak pernah memperhatikan kewajibannya. Jadi jalan keluarnya ambillah resiko yang paling ringan. Resiko yang paling ringan itu artinya kalau ada utang maka kita harus membayarkan tetapi kalau tidak ada maka akan menimbulkan bahaya jiwa. Kalau isteri mempunyai utang dan mampu membayarnya maka tidak mesti suami membayarkan. Jadi apapun yang dilakukan oleh isteri harus diketahui oleh suami dan apabila seorang isteri sudah mencoreng nama baik keluarga maka suami bisa menceraikannya. Suatu

³⁶Wawancara dengan Dr. Anshori Ilyas, SH. MH pada tanggal 16 Oktober 2015.

³⁷Wawancara dengan Dr. Anshori Ilyas, SH. MH pada tanggal 16 Oktober 2015.

keutuhan rumah tangga akan dipertaruhkan apabila suami atau isteri sudah tidak ada lagi kecocokan.

Menurut penulis, putusan dengan Nomor Perkara 608/Pdt.G/2014/PA.Sgm. hakim hanya melihat dari kemampuan suami sebagai kepala teknisi proyek PT. GCO. Resource dan pemilik tambang pasir. Padahal selama terikat hubungan perkawinan, Tergugat selalu mengirim uang sebesar Rp. 4,5 juta.

Selain itu perlu ditekankan bahwa jika merujuk pada ketentuan hukum Islam, maka hukum pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Tetapi dalam perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa, ini penulis kurang sependapat dengan pertimbangan hukum tentang pertanggungjawaban utang yang dibuat oleh si isteri dan dipakai untuk kepentingan pribadi masih harus tetap dibebankan kepada suami. Karena setidaknya kalau suami isteri ingin melakukan sesuatu termasuk berutang kepada pihak ketiga, maka harus saling diketahui satu sama lain.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pertanggungjawaban utang bersama yang dibuat untuk kepentingan pribadi yang dibuat pada saat masih status suami isteri harus ditanggung bersama juga, namun pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut hanyalah sebagai dasar secara umum. Pertanggungjawaban utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga seringkali dibenturkan dalam kasus-kasus tertentu, dengan melihat kenyataan bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama Sungguminasa ini dimana sang isteri berutang untuk kepentingan pribadi bersama orang lain. Mengenai hal tersebut dimungkinkan untuk pertanggungjawaban utang dengan porsi yang berbeda berdasarkan posisi kasusnya.
2. Didalam penerapan hukumnya kita dapat melihat kepastian dan kemanfaatan hukumnya, dengan aturan yang menyatakan bahwa harta bersama dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ untuk suami dan isteri begitu juga utang yang ada pada saat masih dalam status suami isteri maka ditanggung bersama juga meskipun utang yang dibuat tersebut bukan untuk kepentingan keluarga.

B. SARAN

Berdasarkan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dibuat untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama, sebaiknya para hakim dalam memutus perkara yang seperti ini harus betul-betul teliti memeriksa dan memutus dengan seadil-adilnya karena pihak suami merasa dirugikan dimana isteri pergi meninggalkan suami dan meninggalkan utang yang banyak dan suami harus menanggung semua itu. Tetapi hakim menetapkan harta bersama yang sudah dijual dibagi dua lagi sementara uang hasil jual tersebut sudah dipakai untuk membayarkan ganti rugi sewaktu suami kecelakaan. Sebaiknya hakim harus memberikan pertimbangan hukum yang memadai sehingga dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Amin, Muhammad. *Utang Piutang dalam Rumah Tangga dan Pembagiannya Akibat Perceraian (Artikel)*, 2010.
- Damayanti, Deni. *Panduan Lengkap Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis, Desertasi*. Yogyakarta: Araska, 2013.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Semarang: Cet V Toha Putra, 1996.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Surabaya: Pal. Mahkota, 1990.
- Departemen Agama, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Harahap, Yahya, M. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU. No. 7 Tahun 1987 Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Hartanto, Dodi. *Utang Suami Isteri Sebagai Sebab Perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2009.
- Karim, Adiwarman A. *Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2001
- Lubis, K, Suhrawardi. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Materil Dalam Praktek Peradilan Agama*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2003.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Republik Indonesia. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta: SinarGrafika, 2006.
- Republik Indonesia. *Undag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2008.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jakarta Timur : Pena Publishing, 1994
- Shiddieqy, TM. Hasbi Ash. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1978
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 2003
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Yurisdiah, Vega. *Proses Pembagian Harta Bersama Ketika Ada Utang Suami Isteri*, Jakarta: Fakulas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2010.